



PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh
Yuli Prastiwi
B4B 009 305

PEMBIMBING :
Prof. H. Abdullah Kelib, SH.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Disusun Oleh :

Yuli Prastiwi
B4B 009 305

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Juni 2011

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.
NIP. 130 354 857

H. Kashadi, SH.MH.
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **YULI PRASTIWI** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 25 Juni 2011

Yang menerangkan,

YULI PRASTIWI

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**, guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus penulis sampaikan kepada Prof. H.Abdullah Kelib. SH yang telah memberikan dorongan, dukungan dan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sampai selesai.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan sudah sepatutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Terima kasih dan hormat penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Yos Yohan Utama, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi penulis kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan strata dua (S2) di Universitas Diponegoro Semarang;
3. H. Kashadi, SH, MH selaku selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Prof. Dr. H. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;
5. Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
6. Para anggota Tim Penguji Tesis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji tesis ini beserta masukan dan sarannya;
7. Dosen, staff pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
8. Karyawan/wati pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang demi kelancaran penulisan tesis ini.

Terakhir, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari tesis ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu demi sempurnanya tesis ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati kritikan dan saran penulis terima hingga tesis ini dapat berguna.

Semoga amal baik yang telah dilakukan mendapat ridho dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.Amin.

Semarang, Juni 2011

Penulis

Abstrak

PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, dengan data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam; 2) Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Hukum Islam, Perkawinan.

Abstract

AGREEMENT MARRIAGES AND THE LEGAL CONSEQUENCES VIEWED FROM THE ISLAMIC LAW AND MARRIAGE LAW

Pre-nuptial agreement provided for in Article 29 of Law on Marriage – number 1 of 1974 not only set the problem and due to marital property but also includes hak-hak/kewajiban that must be met by both parties throughout the agreement does not conflict with the boundaries law, religion and morality. While pre-nuptial agreement in the Islamic law does not provide expressly the purpose of the marriage covenant. In the Islamic Law is only valid marriage agreement if made before or during marriage, in accordance with the provisions of Article 47 paragraph (1) KHI.

The study aims to determine the provisions of the agreement to marry according to Islamic Law and Law of Marriage and the legal consequences arising from the implementation of the provisions of the agreement to marry according to Islamic Law and the Marriage Law.

The method used in this research is normative, with the data used are secondary data. Analysis of the data used normative analysis, then analyzed to obtain clarity of problem solving, then a deductive conclusion, namely the case of a general nature go to things that are special.

Based on the results of this research is that: 1) Basically, in Islamic law (Sharia) is known the existence of joint property in marriage but not binding, but with the Marriage Act No. 1 of 1974 opened the possibility for Muslims to make the marriage covenant in unite marital property into community property. And forms of agreements stipulated in the Marriage Act No. 1 of 1974 does not contradict Islamic law, 2) The legal consequences arising from the implementation of the provisions of the agreement to marry according to Islamic Law and the Marriage Law that the Marriage Act No.1 of 1974 was not – limiting the things that will be agreed, as long as not violating the limits of the law, religion, morality. Meanwhile, according to Islamic law the agreement must not conflict with Islamic law, so the prevailing Islamic Law of Marriage.

Keywords: Covenant Marriage, Islamic Law, Marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber dan Jenis Data	23

4. Teknik Pengumpulan data	25
5. Teknik Analisis Data	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	28
1. Hukum Perkawinan.....	28
a. Menurut Hukum Islam	35
b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	36
2. Pengertian Perkawinan.....	37
a. Menurut Hukum Islam	37
b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	43
3. Dasar-Dasar Perkawinan.....	45
a. Tujuan Perkawinan.....	45
1) Menurut Hukum Islam	45
2) Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	48
b. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	49
1) Menurut Hukum Islam	49
2) Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	52
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin	55
1. Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	55
2. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	61

C. Akibat Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Perkawinan	69
-------------------------------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	73
B. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan...	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Pembinaan terhadap keluarga khususnya hukum perkawinan, adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita – cita bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti, bahwa peraturan yang dicita – citakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita – cita unifikasi.

Cita – cita unifikasi selanjutnya diwujudkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksananya. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.¹

¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 46

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal demikian nampak dari penjelasan umum No (2) dari Undang-Undang Perkawinan, yaitu bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat dan juga bagi orang – orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat, namun bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74), sedangkan bagi orang Timur Asing Cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum perdata dengan sedikit perubahan, dan bagi orang – orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka. Untuk orang – orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka telah terjadi unifikasi dalam hukum perkawinan (penyatuan hukum), sehingga peraturan – peraturan mengenai perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur dalam undang – undang perkawinan ini. Sedangkan mengenai perkawinan campuran diatur juga dalam undang-undang tersebut.

Pengertian perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya, karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian kawin masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatutnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis ?

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta istri dan yang mana harta suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Biasanya perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan

hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian kawin banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.

Perjanjian perkawinan diatur di Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, pada waktunya atau sebelum perkawinan, dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Jika mengacu dari Pasal 29 ini jo pasal 176 KUH Perdata, maka perjanjian perkawinan dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Apabila perjanjian kawin dibuat sepanjang perkawinan, maka perjanjian tersebut batal. Perjanjian dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah perkawinannya mengalami perceraian, yang dimasalahkan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pembagian harta bersama di antara mantan suami-istri tersebut. Permasalahan harta bawaan dan harta bersama ini setelah perceraian sudah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Seandainya suami-istri memiliki perjanjian, maka harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian akan diatur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dirumuskan. Perjanjian perkawinan tidak mutlak harus ada.

Perjanjian perkawinan lebih sering didengar pada golongan penduduk yang tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi dengan

keluarnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional dan tidak membedakan tentang penggolongan penduduk, maka tesis ini membahas tentang perjanjian perkawinan sehubungan dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan dicantumkannya perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, maka anggapan masyarakat bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak benar.

Untuk menjernihkan anggapan yang keliru, maka disini diuraikan sejauh mana perjanjian perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 itu dan Hukum Islam, berdasarkan hal itulah Pasal 66 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai aturan Penutup masih membuka kemungkinan bagi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam untuk dapat diberlakukan sepanjang hal-hal tersebut belum diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Di samping itu dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "perjanjian" yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk *ta'lik talak*. Sedang di dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat (1), bahwa :²

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian yang kamu perbuat, yang berarti bahwa segala janji yang telah diperbuat dan yang telah diikat antara manusia demi kepentingan pergaulan sesama manusia mestilah dipenuhi".

Jadi jikalau ada perjanjian yang diperbuat antara manusia dengan manusia, antara suami dan isteri, perjanjian itu adalah sah siapapun yang membuat perikatan berdasarkan perjanjian berarti mempunyai perjanjian berdasarkan Syariat Islam.³

Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat (1) tersebut diatas adalah suatu dasar untuk membuat perjanjian perkawinan untuk golongan penduduk yang menganut Agama Islam, karena ayat tersebut tidak membatasi bentuk perjanjian. Oleh sebab itu terdapatlah satu Perjanjian tentang perjanjian perkawinan, cuma cara dan bentuk perjanjian perkawinan tersebut tidak secara tegas dijelaskan dalam Kitab Al-Qur'an dan Hadits juga belum dapat penjelasan tentang perjanjian perkawinan tersebut.

Apabila dilihat perjanjian di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang

² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, TT). hlm 1025

³ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : CV. Percetakan Mestika, 1977), hlm 173.

pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami isteri. Sedangkan perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut.

Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat

(1) KHI, yaitu :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”

Adalah lebih baik jikalau perjanjian perkawinan itu dilakukan lebih dahulu sebelum perkawinan, ditandatangani dan dibacakan atau dilafazkan sesudah perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Di samping itu dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa “perjanjian” yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk *ta’lik talak*. Sedang di dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti halnya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut kiranya perlu diteliti lebih lanjut mengenai perjanjian kawin menurut

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam Hukum Perkawinan dan Hukum Islam sesuai dengan hukum yang berlaku bagi golongan masing-masing.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memberikan bahan perbandingan hukum bagi kalangan masyarakat yang berminat mempelajarinya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Ikatan perkawinan yang merupakan perbuatan mulia menurut hukum Islam tersebut, pada dasarnya sesuai dengan dasar hukum perkawinan bagi orang Islam, sebagaimana diatur di dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat (3) yang artinya : ⁴

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyyah, 1993), hlm. 355

“...maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kiranya takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, hendaklah kamu kawini seorang saja”.

Selanjutnya firman Allah SWT Surat Ar Rum ayat (21) yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dengan demikian perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yasin ayat (36) yang artinya :⁵

“Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Sesuai ketentuan dengan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah

⁵ H.S.A. Hamdani, *RISALAH NIKAH (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 1

tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁶ Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT.

Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *ukhrowi* (akhirat) dikemudian hari.⁷ Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta kasih (*mawaddah*), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

b. Menurut ketentuan Pasal 26 KUH Perdata

Perkawinan menurut Pasal 26 KUHPerdata : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

⁶ Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1995), hlm. 114

⁷ *Ibid*, hlm. 115

c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.⁸

Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".⁹

⁸ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.* hlm. 354

⁹ *Ibid*, hlm. 355

Dalam pandangan orang Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu, dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara daripada kebinasaan dari hawa nafsunya.¹⁰

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 79

¹¹ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989). hlm 110

2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan didalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar

masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan

sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Hal itu disebabkan karena batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e. Mengacu pada tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri

Apabila membandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dengan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

3. Perjanjian Kawin

Menurut sejarahnya, perjanjian perkawinan ini untuk melindungi harta milik istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Pada masa itu, perempuan dalam perkawinan dianggap tidak cakap dalam mengurus segala masalah hartanya dia harus mendapatkan pendampingan suami. Namun untuk hukum positif Indonesia tahun 1963, istri berhak melakukan untuk suatu tindakan hukum tanpa bantuan suami.

Perkembangan sistem dan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat yang terjadi pada akhir – akhir ini, membawa dampak pada sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan kecil keluarga. Perubahan yang terjadi selanjutnya dalam pola pikir adalah semakin beragamnya keinginan untuk dianggap sama dan setingkat tanpa membedakan *gender*.

Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita, adalah mengenai adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan dan menyebabkan adanya pemisahan harta di antara mereka. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami isteri dirasakan oleh

masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya.¹²

Di sisi lain, budaya praktis menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan, termasuk didalamnya mengenai pandangan terhadap harta kekayaan suami isteri sebagai akibat dari perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan campuran, maka tidak sedikit pasangan yang membuat perjanjian kawin sebelum mereka melakukan perkawinan.

Perjanjian Kawin belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian kawin sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Perjanjian Kawin yang dimaksud adalah perjanjian yang diadakan oleh calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka laksanakan terhadap harta masing-masing, sesuai dengan definisi dari perjanjian kawin itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) KHI, Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 139 KUH Perdata meskipun tidak tertutup kemungkinan dalam perjanjian kawin mengatur selain harta.

Jika ada perjanjian perkawinan otomatis terjadi pemisahan harta antara istri dan suami. Dipandang penting, kalau harta istri yang dibawa dalam perkawinan lebih banyak dibanding milik suami. Masalah lain

¹² J. Satrio *Op. Cit*, hlm. 147

mengenai harta istri, misalnya suaminya pengusaha dan pailit, kalau tidak ada perjanjian perkawinan maka otomatis harta itu akan ikut disita pengadilan. Jika telah ada perjanjian perkawinan, pengadilan tidak berhak mengusiknya.

Perjanjian perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, amat fleksibel. Jika mengacu pada KUH Perdata pembuatannya sebelum melakukan pernikahan harus di depan notaris, tetapi Undang-Undang Perkawinan tidak mengisyaratkan demikian, bisa menyusun sendiri kemudian disahkan petugas yang melangsungkan pernikahan, tanpa ke notaris. Namun dalam keabsahan hukum (bukan berarti pencatatan pernikahan tidak memiliki legalisasi hukum) demi amannya lebih baik dibuat di kantor notaris, yang nantinya oleh notaris didaftarkan di pengadilan negeri, sehingga akte tersebut merupakan bukti yang sempurna.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran (Q.S.30:21) adalah (artinya) :¹³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* hlm. 1057

tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi.

Ketentuan perjanjian perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (2) bahwa perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam terdapat kaitannya dengan perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPdata mengemukakan bahwa Undang-undang telah menentukan 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walau dengan teks yang berbeda mempunyai unsur-unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPdata. Namun demikian, dalam perjanjian *ta'lik talak* mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian *ta'lik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.13

yang dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier,¹⁶ yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,¹⁷ yaitu :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan-peraturan perundangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), hlm 10

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 14.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 141.

kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pernikahan;

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah, peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini dan selanjutnya menganalisa masalah-masalah yang dihadapi untuk menghimpun data sekunder.

Studi Dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 23.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 21

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian dengan mewawancarai beberapa notaris, panitera dan hakim penadilan agama serta petugas pencatat perkawinan.

Pedoman wawancara dan permintaan data yang terarah dan sistematis dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Panitera Pengadilan Agama Kota Bogor;
2. 2 (dua) Notaris di Wilayah Kota Bogor;
3. 2 (dua) Petugas Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpul dan diatur urutannya dan langkah selanjutnya melakukan pengolahan dan menganalisis data. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu data yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasi sesuai dengan kelompok pembahasan dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara yuridis.²⁰

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh setelah diolah, data yang diperoleh kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif, sehingga secara lengkap akan menjadi analisis kualitatif dengan menggunakan data secara induktif yang telah dianalisis.²¹ Dari kegiatan

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.103.

²¹ *Ibid*, hlm. 5

analisis ini diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Hukum Perkawinan

Bagi umat Islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepat mungkin merampungkan sebuah undang-undang tentang Perkawinan yang bisa menampung sebagian besar syariat Islam.

Seperti dimaklumi, sebelum lahirnya UU No.1 tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam melaksanakan perkawinan, antara lain Hukum Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan Hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam.²² Penggolongan ini yang mengakibatkan timbulnya ketidak sinkronan peraturan mana yang dipakai masyarakat sehingga sering muncullah golongan-golongan taat hukum yaitu :²³

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang - orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74);

²² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1982), hlm. 11

²³ Penjelasan Umum pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan melihat uraian diatas jelaslah bahwa pengaturan perkawinan sebelum era UU No.1 tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan golongan penduduk. Ini berarti, perkawinan seseorang diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi golongannya (bukan golongan orang lain) kecuali ia menundukkan diri terhadap suatu hukum tertentu.

Dalam hal penundukan diri, misalnya orang Indonesia asli yang beragama Islam menundukkan diri pada KUH Perdata, maka baginya berlaku hukum yang baru, *in casu Burgelijk Wetboek* (KUHP Perdata), sedang hukum Islam tidak lagi berlaku baginya.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan.²⁴ Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1974), hlm.7.

Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian Undang-Undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, *Talak*, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.

UU No. 1 tahun 1974, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian, khusus bagi umat Islam Hukum Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh Pasal 2 ayat (1) UU tersebut diatas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing *agamanya dan kepercayaanya* itu.

Seperti diketahui, sebelum UU No. 1 tahun 1974 lahir, di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie*

voor de Christenen Indonesiers) Staatsblad 1933 no. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) Staatsblad 1898 no. 158, dan sebagainya. Oleh karena itulah kemudian diusahakan suatu hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia (Unifikasi Hukum Perkawinan).

Tetap berlakunya Hukum Perkawinan Islam bukan berarti lantas bertentangan dengan UU Perkawinan Nasional, melainkan justru terdapat keserasian diantara keduanya. Kalaupun ada yang tidak sejalan, pada umumnya terdapat cara pemecahannya, perbedaan persepsi, dan beberapa tambahan lain seperti pencatatan perkawinan yang menjadi kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia sampai sekarang masih dipersoalkan. Misalnya Pasal 10 UU Perkawinan menyatakan bahwa *talak* atau cerai paling banyak 2 (dua) kali, tetapi dilanjutkan dengan *sepanjang masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain*.

Beberapa aturan dalam syari'at Islam telah diambil dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia ketika menyusun UU Perkawinan Nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa penyusunan hukum perkawinan nasional tidak melepaskan unsur- unsur keagamaan.

Dalam uraian selanjutnya, perbandingan antara hukum perkawinan Islam dengan UU No. 1 tahun 1974 akan disinggung secara garis besarnya. Dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini.

Berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie voor de Christen Indonesiëts*) *Staatsblad 1933* No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, sejak saat itu semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh golongan penduduk Indonesia, pelaksanaannya harus bersumber kepada UU No.1 tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UU tersebut.

Untuk mengkompromikan berbagai masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, maka pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.²⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah : suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-

²⁵ Direktorat Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1991/1992, hlm. 1-9.

kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau Pasal-Pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku: Buku I : tentang Hukum Perkawinan, Buku II : tentang Hukum, Kewarisan, Buku III : tentang Hukum Perwakafan.²⁶

Lahirnya KHI yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya Masyarakat Islam) agar didalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁷

Hukum Materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang tersebar dalam kitab-kitab fiqih yang beredar di Indonesia. Adanya KHI ini ditambah dengan fatwa, yurisprudensi dan sumber-sumber lain maka akan menambah wawasan para hakim dalam memutuskan perkara.

²⁶ Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*; Makalah Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.

²⁷ Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm 1

a. Menurut Hukum Islam

An-Nikaah hukumnya dianjurkan, karena nikah itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau ibadah (halal atau kebolehan). Namun demikian asal hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab kasusnya dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib dan haram.²⁸

Hukum nikah ini sunnah untuk orang yang bisa menahan biologis dan tidak khawatir terjerumus ke dalam zina jika dia tidak menikah, dan dia telah mampu untuk memenuhi nafkah dan tanggungjawab keluarga. Hukum nikah dibagi menjadi 5, yaitu: Jaiz (boleh), Sunat, Wajib, Makruh, dan Haram.²⁹

Adapun orang yang takut akan dirinya terjerumus ke dalam zina, jika dia tidak nikah, atau orang yang tidak mampu meninggalkan zina kecuali dengan nikah, maka nikah itu wajib atasnya. Dasar Hukum Perkawinan Islam ditemukan beberapa ayat dalam al-Quran Surat (QS): II ayat 235, 237, QS IV ayat 1, 3, 127, QS XXX ayat 21, QS XXIV ayat 32.

Masalah perkawinan dengan sangat teliti telah diatur, dari yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1990), hlm. 25

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 383-384.

pasangan (*Adz Dzariyat* : 49), manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*Al Hujurat* : 13), perintah kawin kepada laki-laki dan perempuan yang belum kawin (*Ar Rum* : 21), sampai kepada masalah-masalah seperti poligami (*An Nisaa'* : 23), *talak/ceraai* (*Ath Thalaq, Al Baqarah* : 229-231), dan sebagainya,serta beberapa hadits rasul.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Mengenai dasar hukum suatu perkawinan ini tidak disebut secara tegas baik dalam UUP maupun KHI.

2. Pengertian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

Kawin dalam Alqur'an disebut "Nikah", menurut bahasa adalah Jima' yang berarti penggabungan & pencampuran. Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan - larangan syari'at.³⁰

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut "Nikah" adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

³⁰ Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, (Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 65.

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.³¹

Perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini, diharapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.³²

Sebagai dipahami dari teks-teks suci Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadist Nabi SAW), perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya, dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual, serta sosial.³³

Menurut Kamal Muchtar sebagaimana dikutip oleh Iman Jauhari, menyebutkan bahwa perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan "nikah" dan perkataan "zawaaf". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Arti

³¹ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty 1999), hlm. 8.

³² K.H. Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 105.

³³ *Loc. Cit.*

sebenarnya "nikah" ialah " *dham* " yang berarti "menghimpit, menindih, atau berkumpul". Sedangkan arti kiasannya ialah "wathaa", yang berarti "setubuh atau aqad", yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.³⁴

Perkawinan merupakan proses hubungan seksual manusia harus berjalan dengan semangat kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita, untuk menempuh kehidupan yang baik di dunia.³⁵

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Menurut Ensiklopedia Indonesia perkataan perkawinan adalah nikah; sedangkan menurut Poerwadarma (1976) kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah; perkawinan yaitu pernikahan. Disamping itu menurut Hornby (1957) *marriage : the union of two person as husband and wife* . Ini berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami isteri.³⁶

³⁴ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 16.

³⁵ *Ibid*, hlm. 15.

³⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi, 2002), hlm. 11.

Lembaga perkawinan adalah dasar dan asa peradaban umat manusia. Kawin pada hakikatnya suatu perikatan (aqad) suci antara calon suami dan calon isteri, yang mesti dilaksanakan oleh tiap-tiap kaum muslimin, kecuali jika ada sebab-sebab penting untuk tidak melaksanakannya. Kemudian perkawinan adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.³⁷

Pernikahan bagi Islam bukanlah sekedar satu ikatan lahiriah atau perjanjian biasa antara seorang pria dengan seorang wanita guna memenuhi kebutuhan biologis dan pertumbuhan keturunan semata-mata, tetapi pernikahan itu adalah Sunnah Rasulullah SAW yang terikat pada ketentuan hukum Islam, yang merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, lembaga pernikahan harus dipelihara keluhurannya dan kesuciannya.

Hendaknya umat Islam, khususnya para orang tua dan remaja, dapat memelihara keluhurannya dan kesucian pernikahan, sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, antara lain :

- 1) Setiap perkawinan dilaksanakan menurut hukum dan tatacara agama Islam. Untuk keperluan pembuktian dan administrasi negara, pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam itu dicatat pada

³⁷ T. Jafizham, *Op. Cit* , hlm. 257.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Seorang wanita yang beragama Islam dilarang (larangan mutlak) kawin dengan pria yang bukan beragama Islam. Pelanggaran terhadap larangan itu adalah suatu perbuatan dosa, yang mengakibatkan hubungan diantara mereka menjadi tidak halal dan karenanya membuahkan keturunan yang tidak sah.
- 3) Seorang pria yang beragama Islam dilarang (larangan mutlak) kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam dan juga bukan wanita Ahlil Kitab (Yahudi dan Nasrani).
- 4) Pada prinsipnya, seorang pria muslim hendaklah berupaya untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita muslimah, kecuali apabila ada faktor-faktor penyebab yang sangat mendesak, seperti pria itu hidup di tengah-tengah lingkungan Ahli Kitab dan atau menghindarkan diri dari kemungkaran.

Salah satu aspek yang diatur oleh hukum Islam yang menyangkut *munakhahat*, yaitu mengatur masalah perkawinan, yaitu mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut syariat Islam untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ajaran Islam dianjurkan untuk melakukan perkawinan karena bermanfaat bukan saja bagi pihak yang melangsungkan perkawinan itu, tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hanya dengan melakukan perkawinan seseorang akan terhindar dari perbuatan maksiat.

Bila keadaan tidak memungkinkan untuk mengadakan perkawinan, ajaran Islam menganjurkan agar melaksanakan puasa. Dengan puasa seseorang akan mampu mengendalikan dirinya gejala birahi dan keinginan untuk melakukan hubungan sex.

Beragam pendapat yang dikemukakan mengenai arti perkawinan menurut agama Islam diantara ahli hukum Islam. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah dan adanya perjanjian yang sangat kuat (*miitsaaghon ghalidzhan*).³⁸

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm. 374.

Perkawinan dalam Islam mempunyai nilai ibadah dan tidak semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah melaksanakannya.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan, maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat UUP dan Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI. Ketentuan Pasal 1 UUP, merumuskan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Kalau dibandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. Namun demikian ada yang agak berbeda bila

melihat kembali Pasal 26 KUH Perdata yang memandang soal Perkawinan hanya dalam hubungan perdata.³⁹

Begitu pula pada Pasal 81 KUH Perdata yang menyebut tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Memang rumusan ini kurang sinkron dengan hukum perkawinan diatas.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.

3. Dasar-Dasar Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.⁴⁰

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung,1979), hlm.1

1) Menurut Hukum Islam

Tujuan pernikahan dalam Islam yang terpenting ada dua, yaitu:⁴¹

a) Mendapatkan keturunan atau anak. Maksud dari "mendapatkan keturunan atau anak" yaitu dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan mendo'akan pada orang tuanya sepeninggalnya, dan menyebut-sebut kebajikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baikny.

b) Menjaga diri dari yang haram

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja.

Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bisa menjaga diri, akan tetapi tidaklah akan terwujud iffah (penjagaan) itu kecuali dengan tujuan dan niat, maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya, karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyandarkan pada pemuasan nafsu atau *jima'* yang berulang-ulang dan tidak ada niat

⁴¹ Al-Qodhi As-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, 2009 *Tujuan Perkawinan dalam Islam*, www.soloboys.blogspot.com

memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaannya antara manusia dengan binatang ? Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan mulia dari perbuatan bersenang-senang yang mereka lakukan itu, yaitu tujuannya memenuhi syahwat dengan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari yang haram.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴²

Berdasarkan rumusan tujuan perkawinan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia;
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

⁴² Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm 26

Berdasarkan uraian tersebut diatas, filosof Islam Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:⁴³

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Jadi tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴⁴

2) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing

⁴³ Imam Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. (Semarang : Usaha Keluarga, Juz 2.) , Hlm. 25.

⁴⁴ Mahmud Junus, *Op.Cit.* hlm. 50

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepiritual maupun material.

Selanjutnya Pasal 3 KHI menyebutkan;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁵

b. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

1) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam,⁴⁶ yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi

⁴⁵ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) hlm. 6

⁴⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1974), hlm. 125

maka perkawinan itu tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Beberapa syarat sah sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah:⁴⁷

- 1) Perkawinan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan QS II ayat 221 (perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani);
- 2) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut Hukum Perkawinan Islam akan berbeda dengan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- 3) Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh dipaksakan;
- 4) Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi syarat yaitu; laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan berlaku adil;
- 5) Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa, dan adil;
- 6) Membayar Mahar (mas kawin) calon suami kepada calon isteri berdasar QS. An-Nisa' ayat 25;

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm 50.

- 7) Adanya pernyataan *Ijab* dan Qabul (kehendak dan penerimaan).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan
Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Beberapa syarat itu diantara imam madzhab berbeda pendapat baik madzhab syafi'i dan Maliki, serta jumhur ulama.⁴⁹

- 2) Adanya wali.

Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali.

Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.

- 3) Adanya dua orang saksi Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah.

⁴⁸ A.I. Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1984), hlm. 10.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media , 2003). hlm. 47-48.

Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan isteri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.⁵⁰

4) Adanya *Sighat* aqad nikah.

Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon isteri. *Sighat* aqad nikah ini terdiri dari "*Ijab*" dan "*qobul*". *Ijab* yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. *Qobul* yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.⁵¹

Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang dianjurkan dipenuhi sebagai kesempurnaan perkawinan, yaitu acara *walimatul ursy* (pesta perkawinan). Namur demikian acara *walimahan* ini sifatnya hanya anjuran.

2) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah

⁵⁰ Muhammad Idris As-Syafi'i. *Al-umm*. (Beirut:Libanon Darul Fikri, Jilid 3, tt). hlm 24.

⁵¹ Muhammad Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali* (Yogyakarta : Kota Kembang, 1978), hlm.7.

(PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 UUP tersebut disebutkan:⁵²

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mempertegas UUP dan PP tersebut diatas, dalam Pasal 10 PP No. 9/1975 tersebut mengatur tatacara perkawinan;

- (3) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (4) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UUP tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam PP 9/1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Berkaitan dengan itu diuraikan dalam KHI yaitu; Pasal 4 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh PPN (Pasal 5&6), akta nikah dan itsbat nikah (Pasal 7). Rukun perkawinan adalah; calon suami, calon isteri, wali nikah,

⁵² Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta : Tintamas, 1986), hlm. 1.

dua orang saksi, dan *Ijab Kabul* (Pasal 14 sampai Pasal 29). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 30 sampai Pasal 38). Larangan Perkawinan karena beberapa sebab (Pasal 39-44).

Bila dicermati dari penjabaran KHI diatas lalu dibandingkan dengan uraian menurut Hukum Islam sebelumnya maka dijumpai adanya perbedaan dalam hal pencatatan perkawinan.⁵³ Hukum Perkawinan Islam tidak mengharuskan suatu perkawinan dicatat oleh lembaga Negara, sementara dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perkawinan harus dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili Calon pengantin akan melangsungkan Perkawinan. Bila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tindakan administratif).

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

1. Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

⁵³ Hasmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang Cet Ke 5 Th. 1995), hlm. 176

Terminologi perjanjian menurut KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak.

Ketentuan ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. *Ta'lik Talak*; dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Lebih lanjut mengenai perjanjian *ta'lik talak* sebagai perjanjian perkawinan dalam KHI yang diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa :⁵⁴

- a. Isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam;
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *ta'lik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh. Supaya tidak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
- c. Perjanjian *ta'lik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;

⁵⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 79-81.

- d. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
- e. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- f. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat;
- g. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga;
- h. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
- i. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
- j. Dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan

dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya;

- k. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- l. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
- m. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat;
- n. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga;
- o. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan lebih dikenal dengan *taklik talak*. *Taklik talak* merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari sang suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan tertera dalam akta nikah.

Taklik talak ini dilakukan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak seorang wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam, akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan isteri tidak mau memperhatikan *taklik talak* itu ketika diucapkan oleh sang suami. Dalam Pasal 46 KHI yang terdiri dari tiga ayat, yaitu :⁵⁵

- (1) Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh.
Supaya *talak* sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
- (3) Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Syarat sahnya *taklik talak* ada tiga, yaitu : ⁵⁶

- a. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata *talak*, seperti: jika matahari terbit, maka engkau *tertalak*. Sedangkan kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan seperti ini digolongkan *tanjiz* (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk *taklik*. Jika *takliknya* kepada perkara yang mustahil, maka ini

⁵⁵ Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 166 dan 174.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 39-40.

dipandang main-main, misalnya: jika ada onta masuk dalam lobang jarum, maka engkau *tertalak*.

- b. Hendaknya isteri ketika lahirnya aqad (*talak*) dapat dijatuhi *talak*, umpamanya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.
- c. Ketika terjadinya perkara yang *ditaklikkan* isteri berada dalam pemeliharaan suami.

Demikian *taklik* yang dibuat Pemerintah yang mesti diucapkan oleh sang suami setelah upacara akad nikah dilaksanakan. *Taklik* itu dapat ditambah, jika ada permintaan dari sang isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadukan, jika dimadukan, dia tidak sabar, sang isteri dapat meminta *fasakh* kepada Pengadilan Agama dan suami membayar sejumlah kerugian, demikian juga dalam soal harta benda dapat diatur di dalam *taklik*.

Segelintir pasangan yang dengan kesadaran bersama mau menyusun perjanjian pernikahan sebelum mereka memutuskan menghadap penghulu atau ke kantor catatan sipil. Bagi sebagian orang, perjanjian semacam itu dianggap menodai ikatan suci pernikahan.

Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian pernikahan ini harus tertulis dan disaksikan notaris sewaktu proses penandatanganan. Dalam Islam, perjanjian semacam ini sudah ada di halaman akhir buku nikah, yang disebut *Sighat ta'lik* dan biasanya di bacakan oleh suami setelah dilangsungkannya *Ijab-qabul*, namun *Sighat ta'lik* ini dibacakan apabila pihak wanita (isteri) minta dibacakan, hal ini berarti *Sighat ta'lik* tidak wajib dibacakan oleh suami.

Adapun isi dari *ta'lik talak* yang ada pada halaman akhir buku nikah, antara lain berisikan: " Jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, menyakiti jasmani, serta tidak memedulikannya selama enam bulan, dan istri tidak rela diperlakukan demikian, maka jatuhlah *talak* satu".

Namun, ada yang menganggap *ta'liq* itu masih kurang sehingga perlu dibuat perjanjian pernikahan secara lebih mendetail dan diutarakan di depan penghulu sebelum *Ijab* kabul. Isi perjanjian itu, misalnya mengenai harta bersama, pembagian tanggung jawab pembiayaan anak, dan pembagian harta jika pasangan berpisah atau salah satu meninggal dunia.

Perjanjian juga bisa memuat larangan melakukan kekerasan, larangan untuk bekerja, pembukaan rekening bank, pemeliharaan dan pengasuhan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, dan hal lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu:⁵⁷

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Calon suami Isteri, sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan (*Huwelijkvoorwarden*), yang mana antara lain :

- 1) Persetujuan perjanjian perkawinan tersebut diperbuat secara tertulis;
- 2) Perjanjian perkawinan tertulis tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 84.

- 3) Sejak pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, isi ketentuan perjanjian tersebut menjadi sah kepada suami isteri dan juga terhadap pihak ketiga, sepanjang isi ketentuan yang menyangkut pihak ketiga.
- 4) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan;
- 5) Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah selama perkawinan, jika perubahan tersebut dilakukan secara sepihak. Perubahan *Unilateral* tidak boleh, akan tetapi jika perubahan atas kehendak bersama atau secara *bilateral* perubahan dimaksud dapat dilakukan;
- 6) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian itu melanggar batas-batas hukum Agama dan kesusilaan.⁵⁸

Pengertian dalam Pasal 29 tersebut, tidak lain dimaksud untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, adalah serupa maksudnya dengan Pasal 139 KUHPdata yakni persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.⁵⁹

Perjanjian yang mengatur sampai dimana batas-batas tanggung jawab pribadi masing-masing seperti yang disebut dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap hutang yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal ini banyak menolong pihak isteri

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

ataupun suami atas tindakan-tindakan atau hutang yang dibuat oleh suami, maka hak isteri tidak ikut tanggung jawab atas hutang tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini bahwa perkawinan tersebut otomatis membuat harta yang dibawa kedalam perkawinan menjadi terpisah. Namun demikian Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dalam Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan :

- 1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing". Oleh karena dalam Pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 hanya menyebutkan pemisahan harta terhadap harta bawaan masing-masing saja, maka dengan adanya Pasal 29 undang-undang tersebut calon suami dan calon isteri dapat membuat perjanjian lain mengenai harta bawaan mereka masing-masing, seperti mengenai tindakan atau hutang yang dibuat suami, harta isteri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasannya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk sahny suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan dan penjelasannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat suami isteri harus ada kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian perkawinan sebelum atau setelah perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena adanya kesepakatan dalam membuat perjanjian perkawinan, maka tidak menutup kemungkinan dengan memenuhi pedoman Pasal 1320 KUHPerdara.

Seorang belum dewasa apabila ia belum mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila telah mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dan setahu orang tuanya.

Pada saat melangsungkan naskah perjanjian perkawinan dan menandatangani naskah tersebut, orang-orang itu atau para pihak sudah harus genap umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah harus cakap melangsungkan perkawinan. Apabila pada saat perjanjian perkawinan itu diperbuat oleh orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, sedangkan perkawinan itu dilangsungkan

setelah dicapai umur yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan (batal), sedangkan perkawinan itu sendiri adalah sah. Dengan demikian untuk membuat perjanjian perkawinan orang-orang itu harus mencapai genap umur 18 (delapan belas) tahun baik pihak pria maupun pihak wanita atau sudah pernah kawin.

b. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Masalah bentuk perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah lebih sederhana dan kuat karena harus dibuat secara tertulis tidak dengan diucapkan seperti apa yang ditentukan dalam Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan ini dibuat tertulis, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sedangkan Hukum Islam perjanjian perkawinan diucapkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan.

Perjanjian perkawinan mana yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dapat juga dibuat dalam bentuk akta dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, akan tetapi dalam Pasal 67 Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaksanaannya secara efektif, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Dalam Undang-undang tersebut tidak diatur ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan secara terperinci, oleh karena ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan itu merupakan hukum tambahan (*aanvullend recht*) yang berarti para pihak dapat mengadakan perjanjian menurut keinginan mereka dengan ketentuan bahwa kehendak mereka yang dicantumkan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Pasal 35 mengenai perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan pada waktu dan sebelum perkawinan. Apabila diperjanjikan lain, maka suami isteri itu hanya dianggap telah melaksanakan perkawinan dengan harta bersama. Oleh karena Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyimpang persatuan-persatuan harta perkawinan.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami isteri maka menurut kehendak mereka terjadilah persatuan/persekutuan harta perkawinan antara mereka dan sebaliknya apabila di antara mereka tidak diperbuat suatu perjanjian perkawinan, maka berlakulah bagi perkawinan mereka itu dengan harta bersama.

Perjanjian perkawinan itu dapat diubah sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perubahan itu harus secara tertulis dan baru sah, apabila disetujui oleh mereka yang dahulu menjadi pihak yaitu tidak hanya mereka yang memberi izin atau persetujuan, akan tetapi juga bagi mereka yang memberikan hibah pada calon suami atau calon isteri.

Perjanjian perkawinan yang disebut pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, supaya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, haruslah perjanjian itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Apabila perjanjian perkawinan itu tidak disahkan, maka harus mempunyai kekuatan hukum bagi suami atau isteri dan tidak mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai tersebut, tidak dapat dirubah selama masih berlangsungnya perkawinan, kecuali perubahan itu atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berbagai alasan dituntut bahwa syarat untuk membuat atau merubah perjanjian perkawinan itu harus dilaksanakan dengan akta

notaris. Pada umumnya naskah itu akan menjamin pengaturan yang baik bagi para pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang penting. Dahulu naskah perjanjian tersebut merupakan suatu jaminan bahwa perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Tetapi di Indonesia tidak demikian, bahwa seorang notaris akan membantu para pihak yang bersangkutan pada waktu membuat akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan atau dengan merubah tanggal akta tersebut seolah-olah perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

C. Akibat Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Perkawinan

Persyaratan untuk sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan *Az-Zarqa* di atas apabila dianalisis lebih mendalam sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUH Perdata terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif.

Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam

fikih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya perikatan.⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fikih Islam Indonesia terlihat kurang memperhatikan akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif pada saat melakukan perjanjian perkawinan yang disebut dengan ta'lik *talak*. Hal ini terjadi karena Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada wanita mencapai umur 16 tahun dan pria mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang berhubungan dengan persyaratan subyektif muncul akibat ketentuan yang menempatkan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik *talak* pada saat pemeriksaan nikah, bukan setelah akad nikah dilangsungkan konsekuensinya adalah apabila kedua mempelai atau salah satu diantaranya menikah dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka pada saat melakukan persetujuan mengadakan perjanjian ta'lik *talak* tersebut kedua mempelai atau salah satu di antara mereka belum dewasa, karena orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin. Oleh karena itu perbuatan hukum yang dapat mereka lakukan hanya sepanjang yang telah diberi dispensasi oleh Undang-undang.

⁶⁰ Almadjidi Abuar-Fida'Isma'il ibn Kasir. *Tafsiral-Qur'an 31-'Azim Juz II*, (Mesir : Dar al-Ihya' al-Kuflb al-Arabiyah, TT), hlm 22.

Ini berarti calon suami dan calon isteri yang akan menikah dan harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka persetujuan tentang adanya perjanjian ta'lik *talak* calon suami dan atau calon isteri diberikan pada saat belum memenuhi syarat subyektif untuk melakukan perbuatan hukum selain perkawinan dan perbuatan hukum melakukan perjanjian talik *talak* digolongkan kepada perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif. Oleh karena itu calon suami dan atau calon isteri yang belum cakap bertindak untuk melakukan perjanjian tersebut harus didampingi oleh wali. Ketentuan seperti ini juga dijumpai dalam ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata.

Perjanjian ta'lik *talak* yang telah melembaga di Indonesia, bukan hanya dilihat dari sudut pandang suatu peraturan yang mengandung nilai dasar manfaat, keadilan dan kepastian hukum, tetapi mengandung nilai yang sifatnya transendental berupa hikmah. Perjanjian ta'lik *talak* dapat ditambah, jika ada permintaan dari pihak isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadu, jika dimadukan dan jika si isteri tidak sabar, sang isteri dapat meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan sang suami membayar sejumlah kerugian.

Disamping ta'lik yang boleh dan sah ada pula ta'lik yang tidak boleh, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam, bertentangan dengan akhlak, moral dan susila, yaitu dalam ta'lik disebutkan bahwa suami memberikan hak kepada istri untuk berkunjung ketempat-tempat yang tidak sopan, atau istri

dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami atau jika suami atau istri meninggal dunia tidak saling pusaka mewarisi.

Dalam perjanjian perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa dapat mencegah perpaduan dengan membuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon istri, yaitu calon suami tidak akan melakukan perkawinan dengan perempuan yang kedua dan seterusnya tanpa setuju atau izin dari istri pertama.

Dalam Islam telah mensyaratkan boleh berpoligami asalkan adil dan terbatas empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya agar tidak diadu. Jika syarat yang diberikan oleh istri ini dilakukan ketika *Ijab* qabulnya supaya ia tidak diadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat dan ia berhak untuk membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya. Oleh sebab itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh istri lebih wajib dipenuhi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Ketentuan-ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan tersebut.

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qu'ran dan Sunnah Rasul. Ketentuan Undang-undang dan Hukum Islam pada umumnya dikatakan hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan dan hukum Islam, misalnya perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan hukumnya sah, apa-bila memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat dari perkawinan tersebut.

Perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami isteri perlu membina saling pengertian dan bantu-membantu serta mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama spritual dan material dalam waktu yang tidak terbatas. Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa'rahmah*.⁶¹ Tujuan perkawinan yang pada umumnya adalah menaati perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dan membangun rumah tangga yang bahagia, damai dan teratur.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi dibuka kemungkinan untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku asas poligami, dimana suami boleh mempunyai lebih dari satu isteri pada waktu yang bersama, terbatas hanya sampai empat orang saja. Syarat utama beristeri lebih dari satu, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang, Kebolehan kawin dengan lebih dari seorang, dibebani syarat yang sangat berat, yaitu berbuat adil. Jadi asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, tetapi poligami diperbolehkan sebagai suatu perkecualian

⁶¹ Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011)

bagi yang sanggup berlaku adil.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya tidak terdapat ketentuan mengenai hak meminang, seperti yang ada dalam Hukum Islam. Hukum Islam membolehkan melihat calon suami/isteri tidak terbatas hanya bagi laki-laki saja. Di dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa perempuan boleh melihat lakilaki yang meminangnya untuk mendapat kesan bahwa laki-laki itu menarik baginya, melainkan yang ada ialah persetujuan kedua calon mempelai dan perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai tersebut harus rela dan sama-sama untuk melangsungkan perkawinan. Kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai itu tentu diawali langkah-langkah pendahuluan seperti perkenalan dan pertunangan.

Pada Pasal 29 ayat (1) dinyatakan pada waktu atau sebelum perkawinan itu dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan tersebut bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dalam kata-kata "sebelum perkawinan dilangsungkan" terkandung kebolehan adanya langkah-langkah, menuju kepada timbulnya persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk usaha kearah itu dapat bermacam-macam,

misalnya sebelum dilangsungkan perkawinan, diadakan peminangan lalu dilakukan persetujuan dan perjanjian.

Hal peminangan yang tujuan utamanya untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan kedua pihak, tidak langsung diatur dalam Undang-undang, tetapi tersirat adanya kebolehan dan anjuran di dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) tersebut. Sedangkan dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam, bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Disini peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam yang dibuat dalam bentuk lisan atau dilapalkan atau diucapkan dengan dihadiri oleh saksi dan bisa juga dibuat secara tertulis sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dalam berbentuk *ta'lik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya pada waktu melangsungkan perkawinan salah seorang atau calon suami atau isteri mempunyai harta bawaan yang diberikan orang tuanya atau dihibahkan kepadanya ingin membawanya ke dalam perkawinan, maka salah seorang yang mempunyai harta bawaan tersebut membuat janji secara lisan

bahwa harta bawaan tersebut akan menjadi harta bersama dengan dihadiri oleh saksi maka perjanjian tersebut telah terjadi dan dapat dikuatkan dengan adanya saksi.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk lain biasanya dalam bentuk kesepakatan dan sama-sama harus/wajib ditepati janji tersebut sesuai dengan legalitas atau kemampuan seorang yang mengucapkan dan membuat perjanjian tersebut, biasanya suami yang membuat perjanjian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari si suami tidak boleh melebihi kemampuan dan kapasitasnya serta terjangkau bagi dirinya. Sedangkan isteri hanya bersifat menunggu dan juga dapat menuntut suami yang sesuai dengan kemampuan dari pasangannya dan terjangkau.

Ada bentuk perjanjian lain yang dibolehkan dibuat dalam perjanjian perkawinan, tetapi bentuk perjanjian tersebut harus sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dari perjanjian perkawinan yang dibuat dan telah disepakati bersama.⁶² Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian perkawinan dalam bentuk lain di Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbentuk material. Bentuk perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk akte Notaris dan disini berarti tunduk kepada KUH Perdata.

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam,

⁶² Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011)

bahwa untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'lik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *ta'lik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya *talak* jatuh. Supaya *talak* sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan gugatan adanya pelanggaran *ta'lik talak* ke Pengadilan Agama. Perjanjian *ta'lik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang membuatnya, sedangkan perjanjian perkawinan atau *ta'lik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pernyataan kehendak secara sepihak. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan dapat dirubah apabila telah memenuhi persyaratan, sedangkan *ta'lik talak* sebagai perjanjian perkawinan diucapkan sesudah atau setelah akad nikah dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan yang termasuk dalam bentuk *ta'lik talak* hanya berlaku untuk umat muslim saja, sedangkan golongan non muslim tidak berlaku bentuk *ta'lik talak* sebagai perjanjian perkawinan.

Menurut pendapat H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bahwa Perjanjian perkawinan yang dibuat

tersebut harus ditandatangani, ada suatu kasus pada saat melangsungkan akad nikah ada seorang suami yang hanya mengucapkan *sighat ta'lik* dan tidak mau menandatangani *sighat ta'lik* tersebut, maka dalam hal ini apabila suami hanya mengucapkan *sighat ta'lik* dan tidak mau menandatangani perjanjian berarti perjanjian perkawinan itu tidak sah dan tidak bertanggung jawab dengan siapa yang diucapkan dan dibuatnya. Oleh karena dalam *sighat ta'lik* yang diucapkan oleh suami harus ada kesepakatan dan *sighat ta'lik* tersebut tidak merupakan suatu rukun sahnya perkawinan, tetapi hanya ada penjabaran dari akad nikah dalam akad nikah tersebut dan suami atau yang bersangkutan harus relevan atau mau menandatangani.⁶³

Perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian yang lain adalah tidak ada dan tidak pernah terjadi. Apabila dalam bentuk perjanjian perkawinan yang ada, perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah terjadi perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan tersebut mengenai harta kekayaan yang ada di dalam perkawinan atau harta bersama. Harta bersama tersebut sebelumnya merupakan harta bawaan dari salah seorang pasangan tersebut yang telah dimasukkannya dalam perjanjian perkawinan. Dimana suami hendak menjual harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan isteri, maka isteri menggugat perihal tersebut ke Pengadilan Agama, dengan alasan karena tidak ada kesepakatan bersama antara suami dan isteri.⁶⁴

Perbedaan lain mengenai syarat-syarat, dalam Undang-undang

⁶³ Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011)

⁶⁴ Hasil *Wawancara*, dengan Sri Mulyani Syafei, Notaris Kota Bogor, (Bogor, tanggal 5 Mei 2011).

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuat perjanjian perkawinan harus ada persetujuan antara calon mempelai, kecuali apabila hukum menentukan lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal calon suami/isteri. Untuk umat Islam ketentuan tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan Al-Qu'ran.

Dalam syarat mengenai umur calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, ketentuan ini juga tidak bertentangan dengan Islam, melainkan dalam Islam bisa lebih muda lagi, karena sudah aqil baliqh dianggap sudah dewasa, maka dapat melangsungkan perkawinan dan dianggap sudah cakap atau dewasa dalam membuat perjanjian perkawinan itu.

Tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan bagi Islam telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo, Undang-undang No. 32 Tahun 1954, Pencatatan perkawinan umat Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, *Talak* dan *Ruju'* (NTR). Bagi yang melaksanakan perkawinan yang bukan secara Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah atau bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam Akta tersebut juga

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dengan selesainya penandatanganan itu, maka perkawinan yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.

Perkawinan yang dinyatakan sah apabila semua syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang telah terpenuhi, apabila orang yang hendak kawin itu harus datang sendiri ke Pegawai Catatan Sipil. Ia tidak boleh diwakili orang lain, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakili orang lain untuk menghadap kepada Pegawai Catatan Sipil. Orang yang mewakili itu harus dikuasakan secara autentik.⁶⁵

Perbedaan tanggung jawab dan kedudukan suami dalam perjanjian perkawinan, menurut hukum Islam tanggung jawab dan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri, karena kedudukan suami disini sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tanggung jawab dan kedudukan isteri dan suami tersebut dalam keadaan seimbang, jadi tidak ada bedanya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau janji yang sangat kuat dan kokoh atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya menurut ibadah. Pada dasarnya bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis atau dilafazkan dalam melangsungkan perkawinan tersebut sudah dikatakan janji kuat dan berakar dan tidak dapat dicabut kembali.

⁶⁵ Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011).

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Disamping ketentuan tersebut, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Adanya suatu perjanjian perkawinan, maka seorang suami memperoleh hak dan tanggung jawab yang lebih tinggi atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Begitu juga seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak dan tanggung jawab sebagai mengurus dan menjaga rumah tangga atau menjaga harta suami dengan baik.

Disamping itu sebagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu. Hak dan kewajiban itu ditegaskan sebagai berikut :

1. Pergaulan hidup bersuami istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta-mencintai dan santun-menyantuni.

Istilah bentuk pergaulan suami istri adalah pergaulan yang baik dan tenteram serta saling cinta-mencintai dan santun-menyantuni. Ketentuan ini disebut dengan kata-kata baik dari kata-kata *ma'ruf*, tenteram dari kata-kata *sakinah*, cinta-mencintai dari kata-kata *mawaddah*, santun-menyantuni dari kata-kata *rahmah*.

Istilah baik atau *ma'ruf* adalah istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan itikad baik atau kejujuran atau tergoeder trouw atau sebagai bapak yang baik yang biasa kita temui dalam istilah-istilah Hukum Perdata, baik mengenai hubungan orang dengan orang ataupun hubungan orang dengan orang yang sekaligus menyangkut harta kekayaan.

Suami dan isteri haruslah bergaul menurut cara yang *ma'ruf* (baik), yaitu saling cinta-mencintai, bergaul baik, setia dan memberi bantuan lahir bathin, antara satu dengan yang lain.

Penjelasan dari yang artinya pergaulilah mereka itu dengan cara yang *ma'ruf*, maksudnya ialah supaya suami bergaul dengan isterinya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan keadaan dan alam

sekitarnya, sepadan dengan syara', adat dan adab sopan santun misalnya dengan saling cintai-mencintai, bergaul baik dengan hati yang suci dan muka yang manis serta setia bantu-membantu. Oleh sebab itu suami tidak boleh menyakiti hati isterinya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, bahkan janganlah suami bermuka masam atau mengerutkan kening ketika berjumpa dengan isterinya, karena semuanya itu tiada sesuai dengan pergaulan yang *ma'ruf*.

Dalam hal ini isteri harus pula bergaul dengan suaminya dengan cara *ma'ruf* pula. Oleh sebab itu isteri harus menyambut kedatangan suaminya dengan hati suci dan muka yang manis, bukan dengan hati marah dan muka masam.

Untuk menjaga pergaulan yang baik antara suami isteri harus kedua belah pihak berhati sabar. Kalau suami melihat cacat pada isterinya, kurang beres urusan rumah tangga atau lambat dalam pekerjaannya, maka hendaknya suami berhati sabar dan janganlah dengan segera memarahinya, menyakiti hatinya atau menceraikannya, karena tidak ada perempuan yang bahkan laki-laki yang suci dari cacat atau aib. Melainkan hendaklah suami berusaha memperbaiki kekurangan isterinya itu dengan jalan nasehat yang baik dan perkataan yang lemah lembut.

Sebaliknya, kalau isteri melihat cacat pada suaminya, misalnya pemarah atau lambat pulang malam hari, maka hendaklah isteri berhati sabar dan janganlah lekas naik darah atau menyakiti hatinya, karena tak

ada di dunia ini laki-laki yang suci dari cacat atau aib, Bahkan hendaklah isteri berusaha, supaya jangan membuat sesuatu yang akan memarahkan hati suaminya, kalau ia pemaarah, atau mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, supaya suaminya suka duduk dirumah dari pada duduk di restoran atau di tempat main judi. Pendek kata kedua belah pihak harus berhati sabar dalam memelihara dan menjaga pergaulan yang *ma'ruf*.

Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yaitu makan/minum, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan kedudukan suami menurut kadar kemampuannya. Menjaga rahasia masing-masing, termasuk ke dalam pengertian pergaulan yang baik bagi suami isteri ialah sama-sama menjaga rahasia pihak isteri dan suami. Haram hukumnya bagi suami membuka rahasia isterinya. Demikian pula haram hukumnya isteri membuka rahasia suaminya. Dan terpujilah masing-masingnya yang menjaga rahasia pihak yang satunya lagi.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 secara umum disinggung kewajiban suami-isteri dalam Pasal 30 yang berbunyi "suami-isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

2. Suami sebagai kepala keluarga/pemimpin rumah tangga.

Dalam hubungan suami-isteri dalam Hukum Islam, maka laki-laki adalah kepala rumah tangga, Pengurusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban isteri, tetapi sebagai

kepala rumah tangga tetap ditentukan oleh si suami. Merupakan *sunnatullah*, bahwa sifat jiwa laki-laki lebih stabil dari jiwa wanita. Begitupun dilihat dari segi fisik, badan laki-laki lebih kuat dari badan wanita. Ini lepas dari pembicaraan buruk baiknya, lepas dari segi penilaian tetapi melihat dari segi kenyataan saja.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 31 ayat (3) menyebutkan ketentuan yang sejalan dengan kehendak ayat diatas dengan sebutan "suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga".

3. Rumah kediaman disediakan oleh suami.

Dalam surah Al-Thalaq ayat (6) tumpuan perintah adalah suami, artinya perintah ditujukan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si isteri dan tempat tinggal itu bersama isteri sendiri. Sungguhpun demikian janganlah penentuan tempat tinggal oleh suami itu justru menyusahkan si isteri. Dengan demikian terlihat pula bahwa kesenangan hati si isteri bertempat tinggal pada tempat tinggal yang ditentukan oleh suaminya itu hendaklah diperhitungkan pula.

Cara termudah dan terlihat nyata dalam menilai kesenangan hati si isteri ialah dengan pernyataan setuju atau kurang setujunya atas tempat tinggal yang dipilih oleh suaminya itu. Biasa dalam kenyataan asal tidak terlalu jauh bedanya dari yang mungkin dipikirkan si isteri, dan dengan menilai kesanggupan suaminya tidaklah sangat sulit untuk memintakan

pernyataan setuju isterinya itu sekedar tidak menyempitkan hati mereka.

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal mengenai ketentuan tempat tinggal itu ditegaskan pendirian yang sedemikian. Pasal yang bersangkutan adalah Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami sedangkan isteri berkewajiban membantu suami mencukupi biaya keperluan hidup, yang termasuk dalam belanja disini adalah belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan kehidupan anak-anak dan belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Ukuran atas semua pembiayaan dan belanja itu adalah kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami dan isteri, tidak berlebihan yang membawa kepada beban melebihi kesanggupan dan tidak pula sedikit-dikitnya untuk keringanan beban dari yang suami seharusnya.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (b) yang berbunyi:

Pasal 34 ayat (1) :

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Penjelasan Pasal diatas meliputi pembiayaan anak-anak apabila mereka

masih sebagai suami isteri. Sedangkan andaikata terjadi perceraian, maka kewajiban pembiayaan anak-anak oleh si suami atau dalam hal ini bapak dari si anak di ungkapkan dalam Pasal 41 huruf (b).

Pasal 41 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan yang memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tanggung jawab isteri dalam mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya menurut cara-cara yang benar dan wajar dapat dipertanggung jawabkan. Sebuah Hadist Rasul mengatakan bahwa "isteri adalah penanggung jawab dalam rumah tangga suami isteri yang bersangkutan" (HR. Bukhari Muslim).⁶⁶

Dalam hubungan kewajiban isteri ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menegaskan dalam pasal-pasal tersendiri disamping kewajiban-kewajiban yang biasanya disertakan dengan kewajiban suami, seperti yang

⁶⁶ *Kitab Himpunan Putusan Majelis Tardjih Muhammadiyah*, 1969, hlm. 275.

telah dilihat diatas tadi, pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 31 :

Ayat (1) : hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Ayat (2) : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 34 ayat (2) : isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama-dalam masyarakat. Disini yang menjadi kepala keluarga adalah suami, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap yang ditentukan oleh keduanya.

Sebagai kepala keluarga, suami wajib melindungi isterinya memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk mendapatkan putusan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Ketentuan-ketentuan mengenai harta suami isteri terhadap harta bawaan masing-masing itu, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya, seperti menjual,

menghibahkannya dan lain-lain. Terhadap harta bersama itu suami dan atau isteri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atau persetujuan kedua belah pihak.

Menurut pendapat M. Hasballah Thaib, dalam persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri.⁶⁷ Apabila dilihat dari persamaannya, hak dan kedudukan isteri dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga seimbang, kecuali dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga atau sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dan menjaga nama baik dan menjaga harta suami, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

Suami wajib melindungi isteri dan memberikan keperluan isteri menurut kemampuannya. Sedangkan dalam perbedaan hak dan kewajiban tersebut, bahwa tentang pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan hak melakukan perbuatan hukum karena dalam hukum Islam isteri berhak sepanjang diizinkan suami dan isteri berada di bawah pengawasan suami. Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal tempat tinggal, karena di dalam Islam masalah tempat tinggal adalah disediakan oleh suami, walaupun tidak ditentukan oleh suami isteri,

⁶⁷ H.M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 1993), hlm.32.

sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditentukan bersama.

Apabila perkawinan putus karena perceraian atau *talak*, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukum masing-masing ialah agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam hak asuh anak, hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Apabila anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 19 tahun atau belum kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya itu, kecuali apabila untuk kepentingan anak itu menghendakinya.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan Islam, bahwa sesuatu yang akan diperoleh yang pada lazimnya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain, dengan demikian berarti hak adalah kebalikan dari pada kewajiban.

Kewajiban suami terhadap isteri dengan membayar *mahar*, memberi belanja, yaitu makan, pakaian dan tempat kediaman, menggaulinya dengan baik, melakukan keadilan jika suami beristeri lebih dari seorang.

Hak sebagai suami yang telah mendapatkan pelayanan yang baik dari isterinya, tentulah tidak cukup hanya ingin dilayani, tetapi yang lebih penting dari itu, suami berkewajiban pelayanan yang lebih baik lagi. Rumah tangga merupakan satu negara kecil, dimana pembinaannya dilakukan bersama-sama baik oleh suami maupun oleh isteri agar segala sesuatunya yang berkenaan dengan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.

Suami sebagai pemimpin rumah tangga, hal ini disebabkan bukan saja karena nafkah rumah tangga dan pendidikan anak-anak semata-mata adalah tanggung jawab suami, tetapi juga karena suami mempunyai beberapa kelebihan.

Apabila suami melanggar ketentuan *ta'lik talak*, maka isteri berhak menggugat kepada Pengadilan Agama, dengan demikian jelas pembakuan *sighat ta'lik* yang dilakukan Menteri Agama akan berakibat tidak sepenuhnya bisa diterapkan asas konsensualitas yang semestinya harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Walaupun kadang-kadang dipergunakan isteri sebagai perjanjian untuk *sighat ta'lik talak*, akan tetapi istilah tersebut bukanlah perjanjian yang sebenarnya dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti *ta'lik talak* karena hanya merupakan pernyataan kehendak calon suami dihadapan para saksi saja dan bukan pernyataan kehendak kedua belah pihak atau calon suami isteri tersebut.

KHI memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk

merumuskan sendiri apa yang akan diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'lik talak* dan selanjutnya Pasal 46 menjelaskan bahwa isi perjanjian perkawinan batasannya hanyalah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Ini berarti KHI yang menjadi hukum materil di lingkungan Peradilan Agama yang telah diberi bentuk formal dengan Inpres dan selanjutnya ditindaklanjuti Menteri Agama dengan Mengeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 26 Juni 1991 tidak mengatur membuat aturan memberi mandat kepada Menteri Agama untuk membuat isi yang diperjanjikan pada perjanjian perkawinan sebagai aturan pelaksana perjanjian perkawinan dalam KHI, karena PMAKPPN tidak mungkin dijadikan juknis, KHI. Sebab PMAKPPN lebih dahulu diberlakukan dari KHI.

Muatan peraturan yang terdapat dalam PMAKPPN hanyalah merupakan peraturan yang sifatnya tambal sulam dari peraturan yang sebelumnya, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 PMAKPPN mengenai persetujuan pihak mempelai wanita untuk membuat/mengadakan perjanjian perkawinan pada saat pemeriksaan kelengkapan persyaratan nikah merupakan pengambilalihan atas ketentuan yang terdapat Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1955 jo Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975.

Masalah yang muncul kembali adalah bagaimanakah status kesepakatan atau persetujuan calon pria dan calon wanita yang

melangsungkan perkawinan berdasarkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan? Dalam KHI tidak dijumpai pengaturan mengenai kecakapan bertindak untuk persetujuan mengadakan perjanjian perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian pendahuluan dalam perjanjian perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan.

Perkembangan dalam praktek juga tidak diperoleh gambaran mengenai hal ini, karena sepanjang yang dilihat dalam putusan pengadilan, belum ada gugatan pembatalan perjanjian perkawinan karena tidak memenuhi persyaratan subjektif. Namun demikian, sebaiknya persetujuan mengadakan perjanjian perkawinan bagi mereka yang menikah dengan memperoleh dispensasi kawin dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan, agar tidak ada keragu-raguan tentang keabsahan perjanjian talik *talak* yang merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan tersebut.

Pernikahan bukan hanya penyatuan emosi dan fisik semata tetapi juga penyatuan finansial, dan perjanjian perkawinan adalah sebuah langkah bijaksana dari sisi hukum maupun sisi finansial yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi ke dua belah pihak pasangan menikah dan terutama anak-anak.

Tanpa perjanjian perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini seringkali terjadi pertikaian dalam hal siapa yang berhak mendapatkan apa dan bukanlah suatu pemandangan yang indah dilihat oleh

anak-anak. Jika perceraian saja sudah terlalu berat untuk mereka apalagi menyaksikan orang tuanya bersitegang tentang harta. Memang tidak mudah membicarakan masalah uang sebelum pernikahan berlangsung, Karena itu tidak semua pasangan pengantin mau membuat perjanjian pra nikah. Biasanya perjanjian pranikah dibuat oleh calon pasangan pengantin yang sudah mapan atau bisa dikatakan mempunyai harta bawaan atau warisan dalam jumlah besar.

Perjanjian perkawinan juga biasanya dibuat bagi mereka yang sudah pernah bercerai dan kini akan menikah kembali. Ada berbagai alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta/harta tertentu dan/atau pengelolaan atas harta tertentu di dalam perjanjian kawin, diantaranya:

1. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat.

Agar istri terlindung dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian kawin, suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan, termasuk semua harta, yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Jadi di sini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang pengurusan suami;

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah.

Adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi istri terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap utang-utang yang

dibuat oleh suami dan sebaliknya.

Dalam KUHPdata untuk dapat membuat perjanjian perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi.

Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Adapun persyaratan umum tersebut adalah tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320, perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1138 ayat (2), karena perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian kawin, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa, untuk membuat perjanjian, asalkan:

- a) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- b) Dibantu oleh mereka yang izinnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan;
- c) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan

pengadilan.

2. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan dan mulai berlakunya perjanjian kawin.

Ketentuan Pasal 147 KUH Perdata dengan tegas menetapkan, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman pembatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian kawin dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali. Pasal 147 KUH Perdata juga menyebutkan, perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin, dengan cara bagaimanapun, tidak dapat diubah.

Pernikahan yang juga berarti komitmen cinta dan finansial tentu membawa dampak bagi kondisi kehidupan dan keuangannya. Mengenai perjanjian perkawinan memerlukan pemikiran yang panjang yang pada akhirnya dilaksanakan dengan tujuan tetap memiliki hak-hak atas aset-aset maupun harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah putusnya pernikahan, tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit.

Selain itu mengurangi penderitaan, emosi dan rasa tertekan semua pihak akibat putusnya pernikahan bagi kedua belah pihak terutama penderitaan anak-anak. Misalnya setelah selama 10 tahun menikah, mungkin kedua belah pihak (suami-isteri) ingin merubah perjanjian perkawinan dan bersikap lebih lunak satu sama lain, maka kemungkinan

perubahan perjanjian perkawinan bisa dilakukan di kemudian hari, sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan.⁶⁸ Lebih lanjut dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dirubah, walaupun perkawinan telah dilangsungkan, tetapi dalam perubahan perjanjian tersebut para pihak tidak ada yang merasa dirugikan artinya untuk kepentingan bersama antara suami dan isteri.⁶⁹

Dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan, jika perjanjian pernikahan atau *ta'lik talak* dilanggar, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui melalui wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara serta dengan Notaris, yang menyatakan bahwa selama mereka menduduki jabatan tersebut, terutama pada Kantor Urusan Agama tidak ada seorangpun yang membuat perjanjian kawin selain yang telah tertera pada halaman akhir buku nikah, itupun banyak pasangan suami isteri yang tidak mau membacakan isi dari *taklik talak* tersebut, karena pembacaan isi *taklik talak* bukanlah merupakan kewajiban dari suami untuk membacakannya, tetapi hanya untuk melindungi hak-hak si isteri.

Begitu juga berdasarkan wawancara terhadap notaris, yang membuat

⁶⁸ Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011).

⁶⁹ Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011).

perjanjian perkawinan juga sedikit, terutama bagi penduduk pribumi, kebanyakan yang membuat perjanjian perkawinan adalah golongan Tionghoa, yang hendak mengadakan aturan berkenaan dengan harta kekayaan.

Melihat kondisi tersebut, maka perjanjian perkawinan di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian, mengenai harta, antara calon suami dan istri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan.

Undang-Undang Perkawinan telah menganut asas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sehingga untuk terpisahnya harta yang dibawa suami/istri dari harta bersama, tidak perlu ditempuh melalui perjanjian kawin.

B. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat setelah akad nikah dilangsungkan, sebab itulah *ta'lik talak* yang termasuk dalam perjanjian dilaksanakan atau dilakukan sesudah akad nikah. Oleh karena *ta'lik talak* hanya terdapat dalam perkawinan Hukum Islam dan dilakukan setelah upacara akad nikah, *ta'lik* yaitu perjanjian yang tiap-tiap pihak terikat kepada perjanjian *ta'lik*.

Pada saat ini Pemerintah di dalam tiap-tiap perkawinan mewajibkan mengucapkan *sighat ta'lik* yang dilakukan oleh pihak suami pada saat selesai *ijab qobul* dilaksanakan. *Sighat ta'lik* tersebut adalah sebagai berikut :

"Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak *ridho* dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) sebagai *'iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah *talak* satu kepadanya, kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial."

Demikianlah *ta'lik talak* yang dibuat oleh Pemerintah yang mesti diucapkan oleh suami setelah upacara akad nikah dilangsungkan, *Ta'lik talak* dapat ditambah jika ada permintaan dari pihak isteri, umpamanya isteri tidak akan dimadu, jika dimadukan dan isteri tidak sabar, isteri dapat meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan suami wajib membayar kerugian tersebut.

Disamping *ta'lik* yang boleh dan sah, ada pula *ta'lik* yang tidak boleh yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan akhlak, moral dan susila, yaitu dalam *ta'lik* disebutkan, bahwa suami memberikan hak kepada isteri untuk berkunjung ke tempat-tempat yang tidak sopan. Atau isteri selama dalam perkawinan tidak dapat belanja dari suami, jika suami atau isteri meninggal dunia tidak saling pusaka mempusakai.

Ta'lik yang dilakukan di Indonesia pada hakekatnya untuk memberi bantuan kepada pihak isteri supaya suami jangan melakukan hal-hal yang sewenang-wenang supaya nasib isteri dipelihara benar-benar sebagaimana mestinya.

Lembaga *ta'lik* ini banyak sedikitnya telah membawa hasil, seperti yang dijelaskan oleh Nani Soewondo Soerasno bahwa *ta'lik* itu ternyata menguatkan kedudukan wanita, karena dengan demikian ia dapat minta cerai bila diperlakukan dengan sewenang-wenang, misalnya dipukul dan sebagainya.⁷⁰ Jadi penjelasan dari Mr. Nani Soewondo Soerasno, seorang pemimpin wanita bahwa lembaga *ta'lik* yang sekarang ini telah memberikan kekuatan di dalam kedudukan wanita, jadi lembaga *ta'lik* ini sangat berfaedah sekali.⁷¹

Setelah melihat isi dari pada perjanjian perkawinan yang disebut *ta'lik talak* nampak bahwa isi *ta'lik talak* tersebut bukan merupakan perjanjian yang mengatur tentang harta benda kekayaan selama perkawinan, melainkan perjanjian sepihak yang dapat mengikat antara suami isteri. Dalam hal memberikan hak kepada isteri untuk melakukan *fasakh* ke Pengadilan Agama. Apabila suami melanggar isi dari pada *ta'lik talak* tersebut dengan syarat isteri tidak ridha akan perbuatan suami yang telah melanggar *ta'lik talak* tersebut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian terhadap harta benda perkawinan, bahwa apabila perkawinan

⁷⁰Nani Soewondo Soerasno *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta : Timun Mas, 1955), hlm. 63

⁷¹ T. Jafizham, *Op.cit.*, hlm.269,

terjadi tanpa perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, maka secara hukum terjadilah persatuan harta.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan terdapat pada Pasal 29 dimana Pasal ini tidak hanya mengatur harta benda calon suami isteri yang akibat perkawinan, akan tetapi dalam pengertian yang lebih luas, juga mengenai syarat-syarat atau janji-janji lain yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pengertian perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah merupakan tindakan hukum dengan siapa telah terjalin persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih untuk menciptakan, merubah atau tidak melakukan suatu akibat hukum, baik mengenai harta benda akibat perkawinan maupun syarat-syarat/keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Adanya peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, tidak ada menguraikan/menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, dalam penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan

dalam pasal ini tidak termasuk *ta'lik talak*.

Apabila dilihat sistematik Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang penempatan bab yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan.

Menurut M.Yahya Harahap, adalah kurang sesuai penempatan bab perjanjian perkawinan tersebut, dengan alasan :⁷²

"Apabila tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dimaksud seperti pengertian *huwelijks voorwaarden* tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan, sebab perjanjian perkawinan itu diatur dalam Bab V, akan tetapi kemudian Bab VII, dijumpai lagi pokok Bab yang mengatur harta benda dalam perkawinan.

Oleh karena itu jika yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 itu konkor dan dengan maksud yang diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka adalah lebih tepat sistematik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu lebih diatur tentang harta kekayaan bersama sebagai pokok Bab dimulai dari Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata barulah kemudian diatur ketentuan perjanjian perkawinan sebagai pokok Bab VII, yang dimulai dari Pasal 139 dan seterusnya.

Hal lain mengenai perjanjian perkawinan ini adalah tentang Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 kurang jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk *ta'lik talak*. Akan tetapi bagaimanapun, bahwa tafsiran yang tersirat dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak lain dimaksudkan untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan itu yakni untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan pemisahan harta dalam perkawinan atau perjanjian yang mengatur batas-

⁷² M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.82- 83

batas tanggung-jawab pribadi masing-masing seperti yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No,1 Tahun 1974 yang dibuat oleh suami terhadap pihak ketiga.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan kedua belah pihak untuk merubahnya dan perubahan itu tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dapat diperbuat baik dengan naskah Notaris maupun dengan perjanjian tertulis, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila tidak akan mengakibatkan kebatalan. Perjanjian perkawinan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah Hukum Perkawinan dilaksanakan apabila perkawinan itu bagi yang bukan Islam. Jadi jelasnya dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai pengesahan perjanjian perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pernerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka:

1. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, *Talak* dan Rujuk;
2. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agamanya selain Agama Islam atau non muslim, maka pengesahan perjanjian perkawinan

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:⁷³

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian yang kamu perbuat". Ini berarti segala janji yang telah diperbuat dan telah diikat antara sesama manusia demi kepentingan pergaulan mesti dipenuhi. Dengan adanya perjanjian antara sesama manusia ini berarti tidak terlepas terhadap perjanjian antara suami dan isteri, dan perjanjian itu adalah sah.

Dengan demikian maka perjanjian perkawinan itu dikenal dalam Hukum Islam, tetapi Hukum Islam tidak menunjukkan apakah perjanjian itu untuk harta benda perkawinan.

Apabila calon suami isteri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan itu ditulis dan ditandatangani oleh pihakpihak, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan *Talak* dan *Rujuk* dan seterusnya dilampirkan ke dalam berkas syarat-syarat perkawinan.⁷⁴

Data yang diperoleh dari perjanjian perkawinan hanya mengenai pembayaran kebendaan atau dalam hal mas kawin/*mahar* yang ditangguhkan pembayarannya oleh calon suami kepada calon isteri sampai 3 (tiga) bulan, kemudian sejak tanggal akad nikah dilangsungkan. Data ini telah dicatat dalam

⁷³ Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011).

⁷⁴ Hasil *Wawancara*, dengan Petugas Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011).

Akta Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang ditandatangani oleh calon suami, dihadapan para saksi dan Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila diteliti lebih lanjut tidak ada suatu ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, yang mengharuskan perjanjian perkawinan itu diperbuat secara tersendiri dan terpisah dari Akta Nikah. Oleh karena itu pembuat Undang-undang menyerahkan saja kepada keinginan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perjanjian perkawinan itu dapat dibuat baik dalam Akta Nikah maupun dalam akta tersendiri. Akan tetapi dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975, telah ditentukan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.

Pegawai Pencatat Nikah/P3NTR yang memeriksa dapat memberikan bantuan administrasi seperlunya apabila calon suami isteri belum mengetahui bagaimana cara membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan harus dibuat di atas kertas bermaterai apabila dokumen itu dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Dalam Daftar Pemeriksaan Nikah jelas ternyata bahwa calon suami telah mengucapkan talik *talak* sesudah akad nikah. Adapun isi *ta'lik talak* itu

adalah :⁷⁵

1. meninggalkan isteri 2 (dua) tahun berturut-turut, atau
2. tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya;
3. menyakiti badan jasmani isteri;
4. tidak memperdulikan isteri selama 6 (enam) bulan.

Alasan-alasan yang mendorong atau menghalangi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan itu tidak diketahui, tetapi menurut Kepala bagian Urusan Agama Islam, karena kedua mempelai saling menyukai, maka perjanjian perkawinan yang dimaksud tentang harta bawaan, harta pusaka atau hibah, masyarakat pada umumnya umat Islam berpegang atau tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam, dengan pengertian bahwa harta pusaka/hibah tersebut adalah merupakan milik yang bersangkutan dan tidak merupakan harta bersama.

Apabila dilihat isi dan tujuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah untuk mengadakan penyimpangan persatuan harta benda dalam perkawinan yakni untuk mengadakan pemisahan harta perkawinan, maka dalam Hukum Islam harta di dalam perkawinan selamanya terpisah.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa : "dari tiga sistem hukum tersebut diatas, Hukum Islam merupakan sistem yang paling sederhana pengaturannya, di situ tidak ada sebagian barang-barang kepunyaan suami dan isteri merupakan harta campuran kekayaan dan justru campuran kekayaan inilah yang sering mengakibatkan kesulitan dan maka

⁷⁵ Hasil *Wawancara*, dengan Petugas Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011).

dari itu membutuhkan peraturan khusus untuk mengatur kesulitan itu.⁷⁶

Berlakunya perjanjian perkawinan menurut T. Jafizham bahwa *ta'lik talak* sesungguhnya suatu perjanjian juga, tetapi *ta'lik talak* biasa diucapkan dengan lafas yang tertentu dan tidak tercakup dalam perjanjian perkawinan.⁷⁷

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dibuat pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sesudah *Ijab Qabul* dilangsungkan sebab itulah *ta'lik talak* yang termasuk dalam perjanjian perkawinan dan dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada disebutkan secara tegas apakah dilaksanakan secara lisan atau secara tertulis. Karena kalau perjanjian perkawinan itu berisikan tentang pemisahan harta benda perkawinan, hal itu tidaklah dibuat suatu perjanjian baik secara lisan maupun secara tulisan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam selamanya harta perkawinan dibawa masing-masing ke dalam perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Adanya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka bagi yang beragama Islam dengan ini telah dapat membuat perjanjian secara tertulis atas, persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perkawinan secara tertulis sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian tertulis mana

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm. 90.

⁷⁷ T. Jafizham, *Op. Cit.*, hal. 114.

kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dapat dirobah atas persetujuan bersama antara suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Untuk menyesuaikan agar perjanjian perkawinan ini sejalan dan sah menurut Hukum Islam, T. Jafizham, mengemukakan :⁷⁸

"Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila diperbuat sesudah kawin, sebab itulah *ta'lik talak* yang juga termasuk dalam perjanjian dilaksanakan sesudah perkawinan. Adalah lebih baik apabila perjanjian perkawinan ini disediakan lebih dahulu sebelum perkawinan ditanda tangani dan dibacakan (dilaporkan) sesudah perkawinan. Dengan demikian sah menurut hukum, yang berlaku dan sah pula menurut Hukum islam".

Apabila perjanjian perkawinan dibuat, ditanda tangani atau disediakan lebih dahulu yang mana statusnya dibuat pada saat *Ijab-Qabul*, hal ini lebih sesuai dengan judul dan isi serta status pihak-pihak didalam perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini ialah apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelumnya, kemungkinan untuk tidak dilangsungkan perkawinan dapat saja terjadi, apabila adanya pencegahan perkawinan atau sebab lain, sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai arti tapi kalaulah perjanjian perkawinan diperbuat setelah *Ijab-Qabul*, perjanjian perkawinan ini mengikat langsung terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan seperti halnya dengan *Ta'lik Talak*. Itulah sebabnya *ta'lik talak* itu setelah *Ijab-Qabul*, karena *ta'lik talak* bertujuan untuk mengikat perjanjian perkawinan yang telah ada.

⁷⁸ *Loc. Cit.*

Sampai sekarang setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat baik karena segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Selanjutnya menurut Kepala Urusan Agama Islam tersebut, pada hakekatnya diluar *ta'lik talak*, diperjanjikan umpamanya mengenai harta yang dibawa sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing pihak sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan terjadi harta bersama. Sebenarnya hal ini tidak perlu diperjanjikan karena dalam hukum Islam sendiri telah diatur mengenai harta bawaan dan harta perkawinan.⁷⁹ Lebih lanjut dikatakan, perjanjian perkawinan itu tidak perlu lagi diperbuat karena perjanjian yang dibuat tersebut dalam *ta'lik talak* telah tertera dalam Buku Nikah sudah cukup dan *ta'lik talak* ini pengertiannya cukup luas. Jarang diperbuat perjanjian perkawinan karena disangsikan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian itu termasuk *ta'lik talak* yang tercantum dalam Buku Nikah biasa dalam bentuk materi, misalnya perjanjian ditulis/dibuat dalam bentuk perhiasan, berupa sertipikat tanah yang akan diberikan untuk isteri. Hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran karena salah penafsiran tentang perjanjian perkawinan akan membawa akibat yang merugikan bagi para pihak yang bermaksud untuk membuat perjanjian

⁷⁹ Hasil *Wawancara*, dengan H. Mad Yani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, (Bogor, 9 Mei 2011).

perkawinan akan tetapi akhirnya enggan melangsungkannya.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa perjanjian perkawinan itu tidak termasuk *ta'lik talak*, oleh kerana dalam perjanjian harus ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak sedangkan dalam *ta'lik talak* adalah hanya pernyataan kehendak sepihak saja. Oleh sebab itu penerangan dan penyuluhan dalam memainkan peranan penting dalam menciptakan suasana yang baik bagi mereka yang hendak membuat perjanjian perkawinan tersebut tanpa ada rasa keragu-raguan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta Notaris dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, tidak ada kelihatan perubahan drastis dalam perjanjian perkawinan. Kebanyakan calon suami atau calon isteri tidak mengetahui maksud dan tujuan lembaga perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Tidak ada atau kurangnya informasi dapat menimbulkan salah tafsir tentang perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, pada umumnya meliputi :⁸⁰

- 1 . tidak ada persatuan harta benda antara suami isteri;
2. harta bawaan masing-masing tetap menjadi milik yang membawanya dalam perkawinan;
3. biaya rumah tangga, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan suami isteri yang bersangkutan menjadi tanggungan

⁸⁰ Hasil *Wawancara*, dengan Sri Mulyani Syafei, Notaris Kota Bogor, (Bogor, tanggal 5 Mei 2011).

suami atau masing-masing pihak menanggung sebahagian dengan ketentuan tanggungan si isteri tidak melebihi penghasilan bersihnya;

4. barang-barang perabot rumah tangga dianggap menjadi milik si isteri apabila terjadi pembatalan atau perceraian perkawinan mereka;
5. pakaian, perhiasan dan lain-lain yang telah dipakai oleh yang bersangkutan dianggap kepunyaan si pemakai barang tersebut.

Apabila dilihat dengan seksama akan ternyata bahwa isi dari perjanjian perkawinan yang telah dibuat di atas tidak hanya mengatur harta benda akibat perkawinan, akan tetapi juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri terutama dalam mendidik dan dalam pemeliharaan anak-anak mereka. Disamping itu, bahwa sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan, tidak pernah membuat perjanjian perkawinan dalam akta Notaris.

Kemungkinan besar calon suami isteri tidak mengetahui bahwa dalam perjanjian perkawinan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara untuk membuat perjanjian perkawinan, maka mereka menempuh jalan pintas yang mudah saja, yaitu pada saat melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Dalam hal ini kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan tidak mengetahui maksud dan tujuan lembaga perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Tidak adanya atau kurangnya penerangan dan informasi yang diberikan kepada calon suami isteri atau kemungkinan calon suami isteri tersebut belum mengetahui bagaimana caranya untuk membuat perjanjian perkawinan yang

selalu dapat menimbulkan kesulitan bagi jalan pikiran mereka dan akhirnya ditempuh jalan yang mudah saja yaitu calon suami isteri melangsungkan perkawinan tanpa memusingkan pikiran mereka untuk membuat perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, sebaiknya oleh calon suami isteri tersebut diberikan penerangan atau penjelasan dan bantuan bagi mereka membuat perjanjian perkawinan, apabila memang dikehendaki oleh calon suami isteri tersebut. Dengan demikian dapat diciptakan suasana yang baik mengenai batas-batas tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat terhadap pihak ketiga.

Sesudah keluarnya Undang-undang Perkawinan belum pernah ada orang yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dengan mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan. Oleh karena itu tidak ada orang yang membuat atau mencatat perjanjian perkawinannya pada kantor Catatan Sipil tersebut. Sudah tentu isi perjanjian perkawinan juga tidak diketahui hal-hal apa yang menjadi sebab orang tidak mencatat atau mengadakan atau membuat perjanjian perkawinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bahasan pada bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

3. Tidak terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan ketentuan yang ada menurut Hukum Islam telah diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, misalnya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam suatu perkawinan adalah sah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Pada dasarnya dalam hukum Islam (Syariah) dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan tetapi tidak mengikat, akan tetapi dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membuka kemungkinan untuk umat Islam membuat perjanjian perkawinan dalam mempersatukan harta suami isteri menjadi harta bersama. Dan bentuk perjanjian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan ketentuan perjanjian kawin menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam

perkawinan menurut hukum Islam sebelum akad nikah dilaksanakan pegawai pencatat nikah menawarkan kepada calon suami isteri akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak, pelaksanaan perjanjian perkawinan demikian sederhana tidak dibuat dihadapan Notaris untuk pengaturan persatuan harta kekayaan suami dan isteri dibuat dihadapan dihadapan Pegawai Catatan Sipil bagi non muslim dan bagi muslim dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam.

B. Saran

1. Mengingat perkawinan dimungkinkan untuk dilakukan oleh orang yang belum dewasa, sepanjang ada izin orang tua atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, maka hendaknya persetujuan untuk mengadakan perjanjian *ta'lik talak* dilakukan setelah akad-nikah dilangsungkan, bukan sebelumnya, karena calon pasangan suami isteri belum dewasa.
2. Mengingat banyaknya terjadi perceraian disebabkan banyak pelanggaran *sighat ta'lik talak*. Sebaiknya *sighat ta'lik talak* tersebut dihilangkan. karena biasanya bila suami tidak suka lagi pada isterinya, maka ia melanggar *sighat ta'lik talak*, agar isteri menggugat cerai ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.I. Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1984),
- Almadjdin Abuar-Fida'Isma'il ibn Kasir. *Tafsiral-Qur'an 31-'Azim Juz II*, (Mesir : Dar al-Ihya' al-Kuflb al-Arabiyah, TT),
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1995),
- Abdurrahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media , 2003).,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi, 2002),
- Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Karya Insan Indonesia, 2005),
- H.S.A. Hamdani, *RISALAH NIKAH (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002),
- Hasymy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang Cet Ke 5 Th. 1995),
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta : Tintamas, 1986),
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1990),
- Ibrohim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, (Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971),
- Imam Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. (Semarang : Usaha Keluarga, Juz 2)
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003),

- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993),
- K.H. Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001),
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003),
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975),
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979),
- , *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta : Pustaka Muhammudiyah, 1989),
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995),
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1990),
- Muhammad Idris As-Syafi'i. *Al-'umm*. (Beirut: Libanon Darul Fikri, Jilid 3, tt).
- Muhammad Muqhniah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali* (Yogyakarta : Kota Kembang, 1978
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006),
- Sayuti Thalib , *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1974),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994),
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty 1999),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001),
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyyah, 1993),

T. Jafizham, *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan : CV. Percetakan Mestika, 1977),

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Our'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, TT).

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982),

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1974).

B. Makalah dan Artikel

Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*; Makalah Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.

Direktorat Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1991/1992,

Al-Qodhi As-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, 2009 *Tujuan Perkawinan dalam Islam*, www.soloboys.blogspot.com

Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 166 dan 174.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan-peraturan perundangan lainnya.